



Available online at <http://pej.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/PEJ/index>

## PRIMARY EDUCATION JOURNAL (PEJ)

PEJ, 1 (2), Juni 2018

Copyright © 2018, PEJ, e-ISSN: 2598-2206

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

---

## Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Zeni Hafidhotun Nisak\*

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta  
Jalan Kaliurang Km 12.5, Candi, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 55581

---

### Abstrak

*Pendidikan inklusif sejauh ini prakteknya sukar untuk ditemui, tetapi tawaran pendidikan inklusif yang mengakomodasi semua anak tanpa terkecuali dengan pola sistem yang menyesuaikan anak dan bukan sebaliknya paling tidak telah menginklusi orang-orang yang tereksklusi dengan mutu pendidikan yang sama. manfaat lingkungan pembelajaran yang inklusif adalah sebagai berikut: Manfaat bagi anak yaitu: kepercayaan diri anak menjadi lebih berkembang; bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya; dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan mengaplikasikan pelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari; mampu berinteraksi secara aktif bersama teman dan guru; belajar menerima perbedaan dan beradaptasi terhadap perbedaan; dan anak menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran. Pembahasan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis menggunakan literatur yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul berdasarkan latar belakang masalah yang ada. Semua teori ataupun fakta yang ada dialisis sedemikian rupa untuk menggambarkan kondisi ideal yang harus dimiliki sebuah negara dalam era digital yang semakin pesat dan berkembang.*

**Kata Kunci:** Pendidikan Inklusif, Kebijakan negara, Mobilitas sosial

### Abstract

*Inclusive education has so far been hard to find, but the offer of inclusive education that accommodates all children is no exception to the pattern of systems that adapt children and not the other way around to have involved people excluded with the same quality of education. the benefits of inclusive learning environments are as follows: Benefits for children: children's self-confidence becomes more developed; proud of himself for his achievements; can learn independently by trying to understand and apply the lessons in school in everyday life; able to interact actively with friends and teachers; learn to accept differences and adapt to differences; and children become more creative in learning. The discussion in this paper is an analytical descriptive use of literature relevant to the questions that arise based on the background of the problem. All theories or facts that exist dialysis in such a way to menggambarkan ideal conditions that must be owned by a country in the digital era is growing rapidly and growing.*

**Keywords:** Inclusive education, state policy, social mobility

---

### 1. Pendahuluan

Sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang, wacana mengenai urgensi dan posisi pendidikan dalam mengontrol tatanan dunia telah dilakukan. Pendidikan dianggap sebagai sebuah motor dan investor bagi kelangsungan peradaban dan

kebudayaan manusia. Pendidikan adalah solusi bagi kebermasalahan manusia dimuka bumi ini. Realitas justru berkata sebaliknya, pendidikan telah tereduksi maknanya. Pendidikan tak lebih hanya sekedar alat bagi penguasa untuk melanggengkan superioritasnya, pendidikan hanya *supplier* tetap untuk pertumbuhan industri dan ekonomi, bahkan tragisnya pendidikan berubah wajah menjadi lintah darat pemeran hasil keringat manusia (baca: pendidikan mahal).

---

\*Penulis Korespondensi.

E-mail: [jeeannisa@gmail.com](mailto:jeeannisa@gmail.com)

Dampak dari sistem pendidikan dengan prinsip pendidikan berkualitas hanya untuk pelanggan yang berkantong tebal hanyalah kemiskinan dan kebodohan yang keduanya akan mengait satu dengan lainnya =bodoh identik dengan miskin dan sebaliknya= tetap akrab bagi mayoritas masyarakat, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia. Tidak saja bagi masyarakat umum yang terbuang dari nikmatnya pendidikan, bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang terkadang masih dianggap sebagai beban dalam komunitas sosial sama sekali tidak mendapat keberuntungan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kondisi mereka.

Pendidikan liberal dan pragmatis yang selama ini dilakukan tidak dapat mengakomodir semua lapisan. Kebermanfaatan “semu” ideologi liberal pragmatis hanya didapat oleh masyarakat kelas menengah atas, sedangkan masyarakat menengah bawah tetap saja menjadi sasaran bagi pengembangan dunia industri dan ekonomi secara praktis.

Hakikatnya pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Dokumen Pendidikan untuk Semua (Deklarasi Dunia Jomtien, 1990) ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan. Akan tetapi, di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 menunjukkan, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Mengatasi hal tersebut pendidikan inklusif diyakini sebagai satu pendekatan pendidikan yang inovatif yang dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak berkebutuhan khusus.

Visi yang diusung pendidikan inklusif adalah keadilan, kesamaan hak, dan kesetaraan yang sejalan dengan ideologi pendidikan kritis transformatif. Dalam ideologi pendidikan kritis transformatif ketiga prinsip tersebut sangat dijunjung tinggi hingga pendidikan kemudian dapat menjadi *production force*, (Nuryatno, 2009) sebagai agen mobilitas sosial yang mampu mengubah kelas rendah yang selama ini disandang oleh anak-anak berkebutuhan khusus, dan bukan sebagai *reproduction force* (Nuryatno 2003) yang selama ini terjadi sehingga hasilnya adalah hanya mobilitas sosial yang vertikal. Untuk itu tulisan ini akan lebih menyoroti pada beberapa pertanyaan mendasar tentang apa itu pendidikan inklusif dan

mengapa harus inklusif dalam pelaksanaan pendidikan? Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan Indonesia?

Pembahasan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis menggunkan literatur yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul berdasarkan latar belakang masalah yang ada. Semua teori ataupun fakta yang ada dialisis sedemikian rupa untuk menggambarkan kondisi ideal yang harus dimiliki sebuah negara dalam era digital yang semakin pesat dan berkembang.

## 2. Pembahasan

### 2.1. Inklusi; Konsep Pendidikan Untuk Semua

Inklusi atau Pendidikan Inklusif bukan nama lain untuk ‘pendidikan kebutuhan khusus’. Pendidikan inklusif menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mencoba memecahkan kesulitan yang muncul di sekolah. Pendidikan kebutuhan khusus dapat menjadi hambatan bagi perkembangan praktek inklusi di sekolah. Konsep pendidikan inklusif memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi gerakan ‘Pendidikan untuk Semua’ dan ‘Peningkatan mutu sekolah’. Pendidikan inklusif merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berpartisipasi.

Definisi Pendidikan Inklusif yang dirumuskan dalam Seminar Agra disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara (terutama dari ‘Selatan’) pada tahun 1998. Definisi ini kemudian diadopsi dalam *South African White Paper on Inclusive Education* dengan hampir tidak mengalami perubahan: Definisi Seminar Agra dan Kebijakan Afrika Selatan ;Pendidikan Inklusif adalah:

- Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan informal.
- Mengakui bahwa semua anak dapat belajar.
- Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak.
- Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, gender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/AIDS dll.
- Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya.

- Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk
- mempromosikan masyarakat yang inklusif. (Stubss, 2008)

Selain definisi Agra ada juga Indeks untuk Inklusi yang merupakan hasil dari proyek penelitian partisipatori selama 3 tahun di Inggris untuk mengembangkan materi untuk mendukung inklusi. Materi ini kini telah diterjemahkan secara meluas dan digunakan sebagai panduan pada berbagai konteks dan budaya. Akan tetapi, berbeda dengan definisi Agra, definisi ini difokuskan pada persekolahan, bukan pada pendidikan secara keseluruhan: Indeks untuk Inklusi, Inklusi dalam pendidikan merupakan proses peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya dari budaya, kurikulum dan komunitas sekolah setempat (Stubss, 2008). Inklusi juga melibatkan:

- a. Restrukturisasi budaya, kebijakan dan praktek untuk merespon terhadap keberagaman siswa dalam lingkungannya;
- b. Pembelajaran dan partisipasi SEMUA anak yang rentan akan tekanan eksklusi (bukan hanya siswa penyandang cacat);
- c. Meningkatkan mutu sekolah untuk stafnya maupun siswanya;
- d. Mengatasi hambatan akses dan partisipasinya;
- e. Hak siswa untuk dididik di dalam lingkungan masyarakatnya;
- f. Memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan sebagai masalah;
- g. Saling memelihara hubungan antara sekolah dan masyarakat;
- h. Memandang pendidikan inklusif sebagai satu aspek dari Masyarakat Inklusif

Konsep inklusi dan eksklusi saling terkait "karena proses peningkatan partisipasi siswa menuntut adanya pengurangan tekanan untuk mempraktekkan eksklusi." Berdasarkan dua pengertian tersebut maka inklusi memiliki dua makna yaitu pendidikan inklusi yang berbasis pada pendidikan informal yang dalam prakteknya banyak digunakan negara-negara selatan yang cenderung miskin dengan partisipasi besar keluarga dan masyarakat, sedangkan pendekatan kedua lebih condong pada persekolahan yang banyak digunakan oleh negara-negara utara yang lebih maju dan modern.

## 2.2. Pendidikan Inklusif dan Para Penyandang Cacat

Pendidikan Inklusif tidak HANYA menyangkut inklusi penyandang cacat. Sebagaimana ditekankan dalam dokumen Jomtien, terdapat banyak kelompok yang rentan akan eksklusi dari pendidikan, dan inklusi pada esensinya adalah menciptakan sistem yang dapat mengakomodasi semua orang. Namun inklusi penyandang cacat telah memberikan tantangan tertentu dan kesempatan untuk kebijakan dan praktek sistem pendidikan umum. Dokumen yang spesifik menyebutkan inklusi untuk semua adalah dokumen Jomtien 1990 yang lebih jauh mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan hak pendidikan untuk semua.

### • Pasal III – Universalisasi Akses dan Peningkatan Kesamaan Hak

1. Pendidikan dasar seyogyanya diberikan kepada semua anak, remaja dan orang dewasa. Untuk mencapai tujuan ini, layanan pendidikan dasar yang berkualitas seyogyanya diperluas dan upaya upaya yang konsisten harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan.
2. Agar pendidikan dasar dapat diperoleh secara merata, semua anak, remaja dan orang dewasa harus diberi kesempatan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat belajar yang wajar.
3. Prioritas yang paling mendesak adalah menjamin adanya akses ke pendidikan dan meningkatkan kualitasnya bagi anak perempuan, dan menghilangkan setiap hambatan yang merintang partisipasi aktifnya. Semua bentuk diskriminasi gender dalam pendidikan harus dihilangkan.
4. Suatu komitmen yang aktif harus ditunjukkan untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan. Kelompok-kelompok yang kurang terlayani: orang miskin; anak jalanan dan anak yang bekerja; penduduk desa dan daerah terpencil; pengembara dan pekerja migran; suku terasing; minoritas etnik, ras, dan linguistik; pengungsi; mereka yang terusir oleh perang; dan penduduk yang berada di bawah penjajahan, seyogyanya tidak memperoleh perlakuan diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan untuk belajar.
5. Kebutuhan belajar para penyandang cacat menuntut perhatian khusus. Langkah-langkah perlu diambil untuk memberikan kesamaan akses pendidikan bagi setiap kategori penyandang cacat sebagai bagian yang integral dari system pendidikan. (Unesco, 1994).

### 3. Inklusi versus Segregasi & Integrasi

Pada awalnya ide inklusi adalah lahir dari ketimpangan-ketimpangan yang terdeteksi dari pendidikan segregasi ataupun integrasi. Praktek pendidikan integrasi adalah ABK dapat berkumpul dengan anak-anak lain dalam sekolah reguler, tetapi prakteknya tidak ditemukan bagaimana sekolah, guru maupun kurikulumnya mendukung keberadaan para ABK, sehingga sekolah integrasi seperti menjadi sekolah segregasi kembali. Baik sekolah reguler yang kaku maupun sekolah khusus yang segregasi telah gagal dalam mempromosikan hak-hak anak secara holistik dan dalam memberikan pendidikan berkualitas yang relevan dan tepat untuk semua anak. "Salamanca 5 tahun", dalam Kajian tentang Aktifitas UNESCO, yang diterbitkan pada tahun 1999,35 memperingatkan bahwa pendidikan luar biasa sering kali mengarah pada eksklusi: "Walaupun maksudnya sangat baik, sering kali hasilnya (dari program khusus, institusi khusus, guru khusus) adalah eksklusi; diferensiasi sering menjadi suatu bentuk diskriminasi, membiarkan anak berkebutuhan khusus di luar kehidupan sekolah biasa dan kemudian menjadi orang dewasa yang berada di luar kehidupan masyarakat sosial dan budaya pada umumnya." (Unesco, 1994).

Maka wacana yang harus dikembangkan adalah bagaimana pemerintah mendukung sekolah segregasi ataupun integrasi berubah menjadi sekolah inklusif. Hal ini disebabkan agar pemerintah secara proaktif mengadvokasi pendidikan untuk semua dan terlibat secara langsung dalam peningkatan mutu persekolahan maupun pembelajaran.

Mengubah sekolah atau kelas konvensional menjadi inklusif, ramah terhadap pembelajaran merupakan suatu proses dan bukan suatu kejadian tiba-tiba. Proses ini tidak akan terjadi dalam sehari, karena memerlukan waktu dan kerja kelompok. Dengan perubahan menjadi sekolah berparadigma inklusif menghasilkan banyak manfaat bagi kita, yaitu kualifikasi guru akan meningkat menjadi pendidik yang lebih profesional, meningkatkan kualitas belajar semua anak, dan kepedulian keluarga, serta masyarakat dalam mendukung wajib belajar untuk semua anak bangsa.

Adapun aspek-aspek (Tarsidi, 2009) penting yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan sekolah yang inklusif adalah sebagai berikut:

1) Guru perlu mengetahui bagaimana cara mengajar anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Peningkatan kemampuan ini dapat kita

lakukan dengan berbagai cara, seperti: pelatihan, tukar pengalaman, lokakarya, membaca buku, dan mengeksplorasi/menggal sumber lain kemudian mempraktekkannya di dalam kelas.

- 2) Semua anak memiliki hak untuk belajar, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah ditandatangani semua Pemerintah di dunia termasuk Indonesia.
- 3) Guru menghargai semua anak di kelas, guru berdialog dengan siswanya; guru mendorong terjadinya interaksi di antara anak-anak; guru mengupayakan agar sekolah menjadi menyenangkan; guru mempertimbangkan keragaman di kelasnya; guru menyiapkan tugas yang disesuaikan untuk anak; guru mendorong terjadinya pembelajaran aktif untuk semua anak.
- 4) Dalam lingkungan pembelajaran yang inklusif, setiap orang berbagi visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja dan bermain bersama. Mereka yakin, bahwa pendidikan hendaknya inklusif, adil dan tidak diskriminatif, menghargai semua budaya, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari anak.
- 5) Lingkungan pembelajaran yang inklusif mengajarkan kecakapan hidup dan gaya hidup sehat, agar peserta didik dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk melindungi diri dari penyakit dan bahaya.
- 6) Sekolah menciptakan sistem dan fasilitas yang sesuai dengan kondisi macam-macam ABK dan bukan sebaliknya, karena jika itu dilakukan maka asumsi yang terbentuk baik oleh ABK ataupun tidak adalah bahwa sistem dan fasilitas yang diberikan bukan sesuatu yang aneh dan diluar realitas, tetapi menjadi sesuatu yang wajar dan integral dalam kehidupan mereka sehingga tidak ada lagi pandangan-pandangan sinis tentang ketidaksamaan mereka.

Menurut laporan UNESCO tahun 2003 dan berdasarkan beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa, ketika Pendidikan Inklusif diterapkan, ternyata terjadi adanya peningkatan prestasi dan kemajuan belajar pada semua anak secara bermakna (signifikan). Di banyak daerah di dunia melaporkan juga, bahwa dengan mendidik anak-anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah umum dapat diperoleh beberapa manfaat pribadi, sosial, dan ekonomi. Banyak siswa dengan kebutuhan khusus ini

berhasil diakomodasi dengan lebih menyenangkan melalui proses belajar bersama komunitas sebayanya. (Bokova, 2014).

Adapun manfaat lingkungan pembelajaran yang inklusif adalah sebagai berikut: Manfaat bagi anak yaitu: kepercayaan diri anak menjadi lebih berkembang; bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya; dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan mengaplikasikan pelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari; mampu berinteraksi secara aktif bersama teman dan guru; belajar menerima perbedaan dan beradaptasi terhadap perbedaan; dan anak menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran.

Manfaat bagi guru antara lain: guru mendapat kesempatan belajar cara mengajar yang baru bagi peserta didik yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam; mampu mengatasi tantangan; mampu mengembangkan sikap yang positif terhadap anggota masyarakat, anak dan situasi yang beragam; memiliki peluang untuk menggali gagasan-gagasan baru melalui komunikasi dengan orang lain di dalam dan di luar sekolah; mampu mengaplikasikan gagasan baru dan mendorong peserta didik lebih proaktif, kreatif, dan kritis; memiliki keterbukaan terhadap masukan dari orangtua dan anak untuk memperoleh hasil yang positif.

Sedangkan manfaat bagi orangtua antara lain: orangtua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya dididik; mereka secara pribadi tentu akan terlibat dan merasa lebih penting untuk membantu anaknya belajar. Ketika guru bertanya pada orangtua tentang anaknya, maka orangtua merasa dihargai dan menganggap dirinya sebagai mitra setara dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas untuk anak; orangtua juga dapat belajar bagaimana cara membimbing anaknya di rumah dengan lebih baik, yaitu dengan menerapkan teknik yang digunakan guru di sekolah, dan manfaat bagi masyarakat, antara lain: masyarakat merasa lebih bangga ketika banyak anak bersekolah dan mengikuti pembelajaran, dan masyarakat akan menemukan lebih banyak “calon pemimpin masa depan” yang disiapkan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat.

#### **4. Analisis pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia**

Di Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, ayat 1 s.d. 4 telah menegaskan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), sejak tahun 1979 sudah ada sekolah umum yang menerima ABK untuk belajar bersama-sama anak-anak normal lainnya karena orang tua menginginkan anak mereka mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah umum dan bukan di sekolah luar biasa (SLB). Searah dengan perkembangan pendidikan baik di luar dan di dalam negeri, pada tahun 2003 Dirjen Dikdasmen menerbitkan SE no. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya empat sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

Selanjutnya, Rencana Strategis Depdiknas tahun 2005-2009 menyatakan bahwa dalam rangka memperluas akses pemerataan dan akses pendidikan bagi anak usia sekolah 7-15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus/luar biasa (Renstra Depdiknas, 2005, hal 49). Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif (Renstra Depdiknas, 2005, hal. 50).

Berdasarkan data Susenas tahun 2003, penyandang cacat di Indonesia berjumlah 1,48 juta orang (0,7% dari jumlah penduduk Indonesia). Sedangkan jumlah penyandang cacat usia sekolah (5-18 tahun) berjumlah 21,42% dari seluruh penyandang cacat (Munawir Yusuf, 2007). Sejak dikeluarkannya SE Dirjen Dikdasmen no. 380/C.C6/MN/2003, Direktorat Pendidikan Luar Biasa telah mengembangkan sekolah-sekolah inklusi menjadi 600

sekolah dan mendidik 9.492 peserta didik berkebutuhan khusus. Pada tahun 2007 tercatat 343 SD dan 19 SMP yang menjadi sekolah inklusi, sedangkan pada jenjang SM, menurut data tahun 2005 berjumlah 40 SMA dan 1 SMK.

Selain itu juga telah dikembangkan buku-buku pedoman untuk sekolah inklusi, kepala sekolah, guru-guru, peserta didik maupun orangtua peserta didik dan masyarakat. Buku-buku tersebut meliputi pedoman alat identifikasi anak berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum, pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan, pengadaan dan pengelolaan sarana-prasarana, kegiatan belajar mengajar, manajemen sekolah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun masih banyak sekolah inklusi yang belum mendapatkan modul dan pedoman tersebut. Ketiadaan modul pada sekolah-sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Di samping itu karena tidak adanya pedoman pembelajaran bagi guru-guru di sekolah inklusi, menyebabkan guru-guru menggantungkan diri pada guru sekolah luar biasa (SLB) sehingga guru-guru ini mengajar berdasarkan nalurinya yang menyebabkan layanan pendidikan khusus di sekolah inklusi tidak optimal.

Berikut adalah kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan empat faktor utama penting yang dapat mempengaruhi keluaran siswa, yaitu: 1) Masukan yang mendukung dari luar sekolah (*supporting inputs from outside the school*); 2) Kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*); 3) Iklim sekolah (*school climate*); 4) Proses belajar-mengajar (*teaching/learning process*).

## **1. Input (*supporting inputs from outside the school*)**

### **a) Karakteristik ABK**

Berdasarkan analisis perbandingan antara teori dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar komponen dalam hal input pada kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan teori. Tidak ada satupun sekolah dasar yang melakukan identifikasi dan asesmen awal terhadap ABK seperti dikatakan teori. Namun demikian, dalam hal penerimaan ABK yang tidak dibatasi baik dari segi jumlah ABK maupun jenis kekhususan ABK, sesuai dengan teori. Selain itu, asal ABK juga sesuai dengan teori, di mana sekolah dasar inklusif telah dapat menerima ABK yang berasal

dari manapun. Jenis kekhususan dan tingkat perkembangan kognitif ABK yang diterima di jenjang sekolah dasar juga sesuai dengan teori, di mana sekolah dasar inklusif bersedia mendidik ABK dengan tingkat perkembangan kognitif bervariasi. Sementara itu, berdasarkan kebijakan, hampir seluruh komponen dalam hal karakteristik ABK yang diterima di sekolah dasar inklusif tidak sesuai dengan kebijakan, seperti dalam hal penerimaan jenis kekhususan yang tidak dibatasi, tingkat intelektual ABK yang masih di bawah rata-rata, tidak adanya penentuan batas jumlah ABK yang diterima, serta tidak adanya syarat rekomendasi tertulis dari pihak sekolah bagi ABK. Tingkat perkembangan kognitif ABK yang diterima juga tidak sesuai dengan kebijakan. Sementara itu, dalam hal sarana dan prasarana umum, sekolah dasar inklusif dapat dikatakan memilikinya, tetapi untuk sarana dan prasarana khusus belum, sehingga inipun tidak sesuai dengan kebijakan.

### **b) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pada dasarnya, kesiapan mental tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dasar inklusif cukup baik, di mana guru-guru dan kepala sekolah mampu bersikap positif terhadap keberadaan ABK sesuai dengan teori. Akan tetapi, mereka belum memiliki pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk membimbing ABK dalam kegiatan belajarnya. Sedangkan untuk dukungan tenaga ahli, hampir seluruh sekolah tidak memperolehnya. Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan teori.

Terdapat beberapa aspek yang sesuai dengan kebijakan, tetapi ada pula aspek yang tidak sesuai dengan kebijakan. Secara umum, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih belum sesuai dengan PerMenDikNas karena sebagian sekolah dasar inklusif belum memperoleh dukungan GPK maupun tenaga ahli dalam pelaksanaan pendidikan inklusifnya. Guru kelas dan guru mata pelajaran telah memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan Undang-undang dan telah memiliki persepsi positif terhadap keragaman siswa sesuai dengan Permendiknas. Namun demikian, guru-guru tersebut belum melaksanakan seluruh kompetensi, peran, dan tugas yang terdapat dalam Pedoman.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Contohnya adalah dalam melakukan asesmen awal dan menyusun PPI untuk ABK yang belum dilakukan di hampir seluruh sekolah dasar. Pada sekolah dasar

inklusif yang memiliki GPK, kualifikasi akademik tidak sepenuhnya tercapai karena banyak GPK yang tidak berlatar belakang pendidikan khusus. Sebagai tenaga kependidikan, kepala sekolah dasar inklusif juga belum memiliki seluruh kompetensi, pemahaman, dan kemampuan yang diatur dalam PerMenDikNas meskipun seluruhnya telah memiliki kualifikasi akademik seperti yang tertera pada Undang-undang. Selain itu, sekolah dasar inklusif juga belum didukung oleh tenaga ahli seperti yang tercantum pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

#### **c) Karakteristik Sekolah (Sarana Prasarana, Aspirasi Pendidikan, Kurikulum)**

Dalam hal pemanfaatan Pusat Sumber Belajar (PSB) dan kompetensi serta peran tenaga ahli di pendidikan inklusif tidak dapat dilakukan perbandingan teori dengan kebijakan karena tidak ada kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Dari segi sarana dan prasarana, sekolah dasar inklusif telah memiliki sarana dan prasarana umum yang lengkap sesuai dengan teori, namun di sisi lain sarana dan prasarana khusus bagi ABK masih minim sehingga tidak sesuai dengan teori. Dengan kata lain, ABK pada belum diberikan fasilitas yang memadai berkaitan dengan kekhususannya. Kemudian, sekolah juga belum memanfaatkan pusat sumber belajar yang dimilikinya sesuai dengan teori.

Dalam hal visi-misi sekolah yang terkait dengan ABK, tidak seluruh sekolah memilikinya. Seluruh sekolah memiliki visi-misi sekolah, akan tetapi tidak semuanya khusus ditujukan kepada ABK. Sebagian besar sekolah memperlakukan ABK sama dengan siswa reguler sehingga tidak ada visi-misi khusus. Akan tetapi, ABK tidak dituntut untuk berprestasi setinggi-tingginya seperti siswa reguler atas pertimbangan ABK tidak boleh dipaksa. Kurikulum yang digunakan di sekolah dasar inklusif juga belum sesuai dengan teori dan kebijakan karena masih sama dengan yang diterapkan pada siswa reguler, dengan kata lain tidak ada modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK., termasuk juga penyusunan PPI bagi ABK yang tidak dilakukan di sebagian besar SD.

#### **d) Dukungan Pihak Luar (Orang tua, Masyarakat, Pemerintah)**

Ketidaksesuaian antara teori dengan pelaksanaan juga terjadi dalam aspek dukungan orang tua,

masyarakat, dan pemerintah. Dukungan dari orang tua ABK, orang tua siswa reguler, maupun masyarakat baru berupa dukungan moral padahal secara teoretik dukungan yang diberikan seharusnya juga berupa dukungan material maupun keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, maupun pemerintah kota/kabupaten, juga belum sesuai dengan teori karena belum merata di semua daerah dan masih sangat terbatas, baik dalam bantuan teknis (keterlibatan dalam pelaksanaan) maupun bantuan non-teknis (dana maupun peralatan).

Ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan juga terjadi dalam aspek dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan orangtua dan masyarakat yang masih berupa dukungan moral saja belum sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, bantuan teknis dan non-teknis yang diberikan pemerintah juga tidak sesuai Undang-Undang karena baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Kota/Kabupaten, belum melaksanakan monitoring, pembimbingan, maupun evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif belum merata dalam memberikan bantuan non teknis (dana dan fasilitas).

## **2. Proses**

### **a) Jam Belajar**

Berkaitan dengan proses pada penyelenggaraan pendidikan inklusi, secara umum, belum banyak sekolah yang benar-benar menjalankan inklusi sesuai dengan teori inklusi yang seharusnya. Waktu belajar yang seharusnya sama antara ABK dan reguler ternyata tidak dilakukan oleh seluruh sekolah dasar inklusi. Walaupun pada umumnya sekolah menyamakan waktu belajar siswa ABK dengan siswa reguler, ada pula beberapa sekolah yang membedakan jumlah jam belajar ini. Sedangkan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan proses, pada beberapa pelaksanaan pendidikan inklusi belum sesuai dengan kebijakan yang ada, dalam hal ini adalah UU pendidikan, Permendiknas dan Pedoman Pendidikan inklusi. Namun, di sisi lain, ada hal-hal lainnya yang dapat dikatakan sudah sesuai. Namun sekali lagi perlu untuk diingat bahwa ada perbedaan dalam kebijakan itu sendiri yakni antara Pedoman Pendidikan Inklusi dan Permendiknas. Dalam hal proses, pada jenjang SD umumnya waktu belajar ABK tidak dibedakan dengan reguler. Hal ini sudah sesuai dengan Lampiran Permendiknas. Hanya ada beberapa sekolah yang

tidak berbeda dikarenakan memiliki bentuk kelas inklusi atau memberikan jam pelajaran tambahan.

#### **b) Strategi Ajar**

Strategi mengajar ABK dapat dikatakan sangat kurang disesuaikan dengan kekhususan ABK di mana seharusnya dilakukan. ABK lebih banyak menerima strategi pembelajaran yang sama dengan reguler. Kalaupun ada perhatian akan kekhususannya seperti strategi khusus, masih minim diterima ABK dan dilakukan oleh guru. Observasi yang dilakukan pada beberapa sekolah juga menunjukkan bahwa hampir seluruh sekolah mengajar dengan strategi yang sama untuk ABK dan reguler. Walaupun pada beberapa saat guru sempat memberikan perhatian khusus, seperti duduk di samping ABK membujuk ABK ataupun membantu ABK, secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan ataupun cara khusus yang dikembangkan guru untuk strategi mengajar ABK yang berdasarkan kebutuhan ABK. Hal yang khusus ataupun berbeda terjadi pada sekolah yang memiliki kelas khusus. Pada sekolah ini, seorang guru dapat membantu 3 orang anak dan bahkan juga memperbolehkan orangtua untuk membantu dalam proses pembelajarannya. Pada saat ulangan misalnya, ABK diberikan soal dengan cara mendiktekan dan juga diarahkan oleh guru lain untuk menulis jawabannya.

#### **c) Evaluasi Hasil Belajar**

Perbedaan teori dengan pelaksanaan juga terjadi pada evaluasi hasil belajar dan pemberian tugas pada ABK dimana secara umum sekolah tidak menjalankan teori mengenai inklusi yang seharusnya. Terjadi kesenjangan dikarenakan evaluasi hasil belajar yang dilakukan walaupun bentuknya serupa, bobot penilaiannya dan juga standar penilaiannya umumnya diturunkan untuk ABK dengan pertimbangan kemanusiaan ataupun agar ABK tidak tinggal kelas. Begitu pula dengan pemberian tugas, umumnya ABK diberikan tugas yang sama namun dinilai dengan standar yang berbeda. Sekolah beralasan hal ini dilakukan untuk penyesuaian. Akan tetapi penyesuaian yang dilakukan tidak didasarkan atas suatu kebutuhan untuk.

Penjabaran evaluasi belajar yang dilakukan oleh sekolah-sekolah pada umumnya merujuk pada evaluasi yang standar dan dilakukan untuk siswa pada sekolah formal. Hal ini sesuai dengan lampiran permendiknas. Walaupun evaluasi belajar dilakukan

sesuai dengan Lampiran Permendiknas, kriteria penilaian untuk ABK tidak sama dengan siswa reguler. Siswa ABK cenderung mendapatkan kemudahan nilai atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

#### **d) Manajemen Kelas**

Ketidaksesuaian juga terjadi dalam hal fleksibilitas dan otonomi belajar untuk ABK di mana secara umum sekolah belum memperlakukan ABK sama dengan reguler dalam menerima dan merespon pembelajaran serta belum memperhatikan dengan sepenuhnya aksesibilitas yang sesuai dengan kekhususan siswa. ABK lebih banyak menerima pembelajaran yang disamakan dengan siswa reguler. Walaupun, pada saat-saat tertentu ABK dapat mendapatkan perhatian khusus. Selain itu pada umumnya sudah ada perhatian sekolah dan guru yang cukup baik untuk membangun fleksibilitas dan otonomi bagi ABK dan beberapa ABK juga dapat mendirikan otonominya di dalam kelas. Dalam hal posisi duduk ataupun merespon pembelajaran seperti menulis dengan braile. Namun hal ini masih sangat terbatas dan dapat dikatakan hanya terjadi pada kasus tertentu. Sehingga otonomi dan fleksibilitas untuk ABK ini masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Namun, perhatian sekolah dan guru sudah menunjukkan kesesuaian dengan pedoman pendidikan inklusi.

#### **e) Modifikasi Kurikulum**

Selain itu kurikulum yang seharusnya dimodifikasi sesuai dengan kekhususan ABK dilakukan hanya dengan pertimbangan guru dan bukan PPI (Pedoman pembelajaran inklusif) yang baik. Modifikasi masih bersifat teknis dan cenderung dilakukan atas dasar kemanusiaan dan bukan hasil asesmen kebutuhan bagi ABK. Modifikasi kurikulum yang terdapat pada pedoman inklusi yang seharusnya dijalankan, pada kenyataannya tidak dilakukan sesuai dengan pedoman yang seharusnya. Hal ini diawali dengan tidak adanya PPI. Meskipun sebagian sekolah menyatakan mengurangi materi ataupun memodifikasi, dasarnya bukanlah asesmen (yang tertuang dalam PPI). Dasarnya lebih pada perkiraan pihak sekolah atau guru. Pada kenyataannya terjadi juga pengurangan bobot nilai untuk ABK tertentu.

#### **f) Penghargaan / Insentif**

Umumnya sekolah ini pun jarang memberikan penghargaan ataupun insentif atas perkembangan



maupun prestasi yang ABK raih yang menurut teori hal ini diperlukan sebagai salah satu motivasi bagi ABK. Sekolah tidak membatasi siapa saja yang berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya. ABK pun ada beberapa yang memiliki prestasi tertentu. Hal ini diperlukan walau pada pedoman inklusi tidak dijabarkan.

#### **g) Partisipasi ABK**

Umumnya kehadiran ABK sama dengan siswa reguler yang absen bila memang sedang sakit ataupun berhalangan. Pada kasus tertentu memang ada pula ABK yang sulit sehingga jarang masuk sekolah. Akan tetapi kasus seperti ini hanya terjadi satu dua saja. Masih berkaitan dengan partisipasi, partisipasi ABK pada lomba yang diadakan sebenarnya cukup banyak. Namun, secara umum masih berupa lomba yang bersifat ceremonial seperti hari kemerdekaan, ataupun kenaikan kelas. Sehingga bila ditelaah lebih lanjut keterlibatan ABK lebih banyak pada sekedar ikut.

Berkaitan dengan partisipasi, partisipasi ABK dalam lomba masih sangat minim, karena kurangnya dorongan ataupun minat ABK sendiri. Sedangkan partisipasi kehadiran (absensi) di sekolah, secara umum, ABK rajin hadir sama halnya dengan siswa reguler. Namun ada pula beberapa kasus yang berbeda dikarenakan faktor dari ABK itu sendiri.

### **3. OUTPUT**

#### **a) Prestasi/Pencapaian Kompetensi**

ABK yang lulus dari sekolah rata-rata telah memenuhi Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan PerMenDikNas. Akan tetapi, terdapat standar penilaian yang berbeda terhadap ABK dari masing-masing sekolah, yang membuat hal ini menjadi tidak sesuai dengan PerMenDikNas dan teori. Meskipun banyak ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan teori dan kebijakan di bagian ini, terdapat juga kesesuaian di mana jenjang SD mampu membuat penerimaan masyarakat menjadi positif terhadap keberadaan ABK. Selain itu, prestasi akademik, keterampilan sosial, dan keterampilan fungsional ABK meningkat, walaupun belum diketahui secara pasti apakah hasil tersebut dikarenakan input dan proses yang berlangsung atau bukan.

#### **b) Partisipasi di Pendidikan Lebih Lanjut**

ABK dari jenjang SD yang telah lulus umumnya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atas dasar inisiatif sendiri dan dengan saran dari

sekolah. Hal ini tidak begitu sesuai dengan PerMenDikNas dan teori, di mana peran serta sekolah dalam memberikan dukungan terhadap ABK seharusnya lebih terlihat.

#### **c) Partisipasi di Sekolah Lama**

Sekolah tidak melakukan pembinaan prestasi unggulan serta pelacakan alumni yang sesuai dengan PerMenDikNas. ABK alumni belum memberikan dukungan pada pendidikan inklusif ketika berkunjung ke sekolah lamanya, hal ini tidak sesuai dengan teori.

### **3. Kesimpulan**

Pendidikan masih diklaim sebagai salah satu media perubahan sosial. Karena perubahan sosial harus dibarengi dengan produk-produk pendidikan yang mengawal transformasi sosial. Pendidikan yang selama ini dilakukan tidak lebih sekedar menjadi alat bagi kelanggengan hegemoni kapitalis, mereproduksi kelas-kelas yang sama dan mengeksklusikan pihak-pihak yang bermodal rendah serta orang-orang yang dianggap tidak normal oleh mereka seperti difabel. Jika demikian yang terjadi maka proses dehumanisasi dan domestikasi telah menjadi agenda utama pendidikan. Pendidikan inklusif sejauh ini prakteknya sukar untuk ditemui, tetapi tawaran pendidikan inklusif yang mengakomodasi semua anak tanpa terkecuali dengan pola sistem yang menyesuaikan anak dan bukan sebaliknya paling tidak telah menginklusi orang-orang yang terekslusi dengan mutu pendidikan yang sama. manfaat lingkungan pembelajaran yang inklusif adalah sebagai berikut: Manfaat bagi anak yaitu: kepercayaan diri anak menjadi lebih berkembang; bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya; dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan mengaplikasikan pelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari; mampu berinteraksi secara aktif bersama teman dan guru; belajar menerima perbedaan dan beradaptasi terhadap perbedaan; dan anak menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut anak-anak yang berkebutuhan khusus tentu dapat menikmati keadilan dan kesetaraan sistem sehingga peluang mereka untuk merubah status sosial mereka tentu jauh lebih besar. Setidaknya secara teoritis, jika mereka belum mampu menjadi kelas atas mereka telah menjadi dan masuk kedalam kelas inklusi masyarakat bukan sebagai orang buangan dan keberadaannya dianggap in-eksis.

## Daftar Pustaka

- Bokova, Iriana, (2014) *Teaching and Learning: Achieving Quality for All*, France.
- Nuryatno, M. Agus, (2008) *Mazhab pendidikan Kritis*”, Yogyakarta: Resist Book, Cet. I.
- Nuryatno, Agus, (2003) “ Sekolah, Reproduksi Sosial dan *Critical citizenship*”, *Kompas* 22 Desember, <http://www2.kompas.com/kcm>
- Stubbs, Sue, (2008) *Inclusive Education; Where There Are Few Resources*, The Atlas Alliance, Schweigaardsgt 12, Oslo, Norway.
- Program Direktorat Pendidikan Luar Biasa Departemen pendidikan nasional, pdf. <http://www.ditplb.or.id/files/kebijakan2006.pdf>
- Unesco . (1994) Ed-94/WS/1 8
- UU NO 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Tarsidi, Didi, (2 Agustus 2008), *Pendidikan Inklusif: Resume*, Retrivet, 14 April 2018, dari <http://d.tarsidi.blogspot.com/>